



PERANAN BUMDES AMANAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA CIBALONG

Annisa Wildani^{1*}, Deden Sumpena², Acep Aripudin³

^{1,2}Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

³Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : annisa.wildani12@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan program BUMDes Amanah, mendeskripsikan produk-produk pemberdayaan yang diharapkan masyarakat, menganalisis output dari pemberdayaan BUMDes Amanah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Cibalong. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang diperoleh merupakan hasil penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara observasi dan wawancara kepada pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Amanah mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera. Masyarakat desa merasakan keringanan harga bahan pokok, memperoleh modal usaha, mendapatkan pelatihan wirausaha, dan mendapatkan pelayanan baik. Dengan adanya pemberian modal usaha, maka penghasilan masyarakat desa meningkat rata-rata 40% s.d. 50%, yaitu dari Rp500.000/bulan menjadi Rp1.000.000/bulan. Mengacu padadata tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi masyarakat melalui program BUMDes meningkat.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi; Masyarakat Desa; Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

This paper aims to determine the BUMDes Amanah program planning, describe the empowerment products that are expected by the community, analyze the outputs of the BUMDes

Amanah empowerment towards the economic empowerment of the people of Cibalong Village. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. Primary data obtained are the results of research in the field, while secondary data obtained from books, documents and journals. Data collection techniques are carried out through observation and interviews with relevant parties. The results showed that the BUMDes Amanah had a role in creating empowered, independent, and prosperous village communities. Villagers feel relief about the price of basic commodities, get venture capital, get entrepreneurial training, and get good services. With the provision of venture capital, then the income of rural communities increased by an average of 40% to 50%, namely from IDR 500,000 / month to IDR 1,000,000 / month. Referring to the data, it can be concluded that the community economy through the BUMDes program is increasing.

Keywords : *Economic empowerment; villagers; village-owned enterprises*

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan roda kehidupan manusia sebagai wadah dalam memenuhi kebutuhan materi manusia. Adam Smith yang merupakan seorang tokoh utama dari aliran ekonomi klasik mengatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi, yang artinya manusia selalu berusaha mencari kepuasan dan kesejahteraan hidup dengan mempertimbangkan pengorbanan yang harus dilakukan (Mulyadi, 2012: 4). Pertumbuhan ekonomi di masyarakat pedesaan termasuk rendah. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat desa yang lemah dan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani dan banyak juga yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Rendahnya ekonomi di masyarakat desa perlu diperhatikan dan diberdayakan, sehingga suatu saat nanti kebangkitan ekonomi Indonesia berangkat dari masyarakat desa. Istilah pemberdayaan menurut Koesnadi Hardjosoemantoro (1995: 61) merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan atau mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan guna untuk meningkatkan mutu hidup. Pemberdayaan juga disebut sebagai upaya dalam membangun daya masyarakat dengan mendorong atau memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat (Aliyudin, 2016: 189). Masyarakat desa sangat membutuhkan pemberdayaan ekonomi untuk membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa secara produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah di dalam bidang ekonomi tersebut.

Pemerintah memiliki posisi penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu diadakannya satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di masyarakat pedesaan yaitu melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola

oleh masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pada akhir Tahun 2016 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memasuki Desa Cibalong sebagai salah satu desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. BUMDes sudah ada sejak tahun 2004, mulai ramai dibicarakan kembali pada tahun 2014 dengan diterbitkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa Cibalong belum sepenuhnya mengetahui BUMDes karena terbatas dengan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, sehingga kekurangan informasi mengenai BUMDes.

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, secara umum Desa Cibalong berupa sawah dan dataran yang berada pada ketinggian antara 300 m s/d 400 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 27°C s/d 30°C (Data profil Desa Cibalong: 2018). Mata pencaharian masyarakat Desa Cibalong sebagian besar merupakan petani dan buruh tani, pedagang, pegawai dan sebagian lagi banyak yang tak tentu pekerjaannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Cibalong masalah yang paling besar ialah Kemiskinan. Masyarakat Desa Cibalong penghasilan sehari-harinya kurang dari Rp.500.000,- (Data profil Desa Cibalong: 2018). Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) penghasilan tersebut termasuk ke dalam perekonomian rendah, sehingga memerlukan lembaga ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Khusus untuk bidang pertanian sebagai salah satu potensi alam dan produk unggulan kawasan Desa Cibalong perlu untuk diberdayakan dan dikelola oleh seorang ahlinya. Masyarakat memerlukan bimbingan dan pelatihan pertanian, serta hasil jual pertanian yang selayaknya. Maka dari itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir untuk memberdayakan perekonomian yang salah satunya di bidang pertanian.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibalong diberi nama BUMDes Amanah sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Cibalong (Sumber dari hasil wawancara dengan Bapak Tatang Gunawan sebagai Direktur BUMDes Amanah, pada tanggal 07 Mei 2019, pukul 09.20 di Kantor BUMDes Amanah). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Desa Cibalong belum menjadi BUMDes terbaik di Tasikmalaya. Untuk menjadi BUMDes terbaik diperlukan kerja keras dan usaha maksimal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah setidaknya sudah memiliki perencanaan, pelaksanaan dan hasil program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan demikian penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Desa Cibalong.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu: Bagaimana perencanaan dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Cibalong? Apa saja produk-produk pemberdayaan ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah? Bagaimana output dari pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah terhadap pemberdayaan ekonomi?

Penelitian yang serupa dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa” yang dilakukan oleh Ai Elis Irma (2018), dengan judul penelitian peran Badan Usaha Milik Desa Tri Mitra Abadi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penelitian selanjutnya dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi” yang dilakukan oleh Singgih Tri Atmojo (2015) perbedaan dalam penelitian ini tentunya dari segi lokasi penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian.

Metode Penelitian yang penulis lakukan ialah dengan menggunakan metode Deskriptif, dimana metode ini menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan dengan apa adanya, yaitu tanpa ditambah dan dikurangi. Selanjutnya, dilakukan penafsiran terhadap data yang ada sebagai solusi masalah yang muncul dalam penelitian (Kuswana, 2011: 37). Dengan menggunakan metode ini, penulis bisa menggambarkan dengan tepat mengenai peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi Desa Cibalong. Selain itu, penelitian ini juga disertai dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif . karena dalam penelitian Kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi di pandu oleh fakta-fakta yang di temukan pada saat penelitian di lapangan (Kuswana, 2011: 44).

LANDASAN TEORITIS

Teori yang dijadikan landasan adalah teori pemberdayaan menurut Edi Suharto (2014: 57-58), dimana pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan kebebasan dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan dan pemberdayaan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dalam meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Pemberdayaan dalam

pandangan Islam merupakan gerakan tanpa henti. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk semua umat manusia telah memainkan peranannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia di muka bumi ini (Sumpena, 101: 2012).

Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keistimewaan tertentu. Manusia sebagai da'i yang dalam kapasitasnya sebagai pembimbing umat memiliki tugas multi fungsi (Aripudin, 2008: 123). Manusia berfungsi sebagai khalifah di bumi (QS.2:30), dan bukan diciptakan Tuhan secara main main (QS. 23:115), melainkan mengemban amanah (QS.33:72) dan beribadah kepada-Nya (QS. 51:56), serta selalu menegakkan kebajikan sekaligus menghilangkan keburukan (QS.3:110), dengan sepenuh tanggungjawab (QS.75:36) (Enjang, 259: 2008). Manusia yang mampu harus saling membantu untuk memberdayakan manusia lainnya yang lemah. Pemberdayaan dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, contohnya dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi untuk mengadakan perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Menurut Agus Effendi (2011: 44) menjelaskan jenis-jenis pemberdayaan yang terdiri dari tiga aspek, yaitu: *Pertama*, pemberdayaan pada mata ruhiyah. *Kedua*, pemberdayaan intelektual. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat (Basith, 2012: 27-28). Masyarakat desa adalah masyarakat agraris yang kebutuhan hidupnya banyak bergerak dari hasil bertani dan menangkap ikan, kehidupan mereka sangat bergantung pada iklim dan pergantian musim (Rustiadi, 2007: 33). Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu terobosan, agar umat tidak hanya “kenyang” oleh makanan rohani saja tapi juga secara jasmani (Setiawan, 2012: 348). Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yaitu agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil (Adi, 2008: 78).

Menurut Gordon dan Kikuchi, indikator pemberdayaan ekonomi diantaranya adalah: *Pertama*, *Benevolence* (pengabdian), yaitu menolong orang lain yang memerlukannya. *Kedua*, *Independence* (kemandirian), yaitu menyukai kebebasan karena kebenaran dan membebaskan orang lain disebabkan kemampuannya. *Ketiga*, *Support* (dukungan), yaitu memberi bantuan dan bersedia menerima dukungan orang lain. *Keempat*, *Recognition* (pengakuan), yakni memberi perhatian dan suka menjaga nama diri maupun kelompoknya. *Kelima*, *Leadership*

(kepemimpinan), yaitu memecahkan persoalan orang lain dengan kemampuan dan kewibawaannya. *Keenam, Comformiy* (kesesuaian), yaitu mematuhi peraturan dan tata tertib serta memilih jalan tengah (Basith, 2012: 31).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat melalui tiga tahapan, yaitu: *Pertama*, Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enbaling*). *Kedua*, Mengembangkan potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). *Ketiga*, Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat (Sumodiningrat & Wulandari. 2016: 21).

Edi Suharto (2017: 67), mengatakan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Pemerintah telah menjalankan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai programnya, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan seperti yang diinginkan bersama. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. Akibatnya ialah menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi pedesaan (Wijaya, 2018: 91). Sistem dan mekanisme dari kelembagaan ekonomi pada pedesaan tidak berjalan efektif serta berimplikasi terhadap ketergantungan akan bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pendekatan yang diharapkan mendorong dan menggerakkan roda perekonomian pedesaan adalah pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola penuh oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan seperti disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai bentuk perwujudan demokrasi ekonomi desa. Demokrasi ekonomi desa adalah sistem ekonomi yang memungkinkan warga desa meramu dan merancang perekonomian yang ingin dilakukan dengan potensi yang dimiliki. Maka dari itu masyarakat desa bertanggung jawab atas kelangsungan kegiatan

ekonomi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi semua masyarakat desa (Suryanto, 2018: 1).

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam buku yang ditulis oleh Maryunani (2008: 35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi suatu desa. BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Tujuan didirikannya BUMDes menurut UU No 6 Tahun 2014 (Tim visi yustisia, 2015: 27) adalah meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pilar utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang harus diperhatikan untuk kokohnya BUMDes sesuai prinsip ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kearifan Lokal atau Nilai-nilai Luhur. *Kedua*, Kemanusiaan. *Ketiga*, Persatuan. *Keempat*, Permasyarakatan. *Kelima*, Kemanfaatan sosial (Suryanto, 2018: 10). Selain prinsip dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ada juga prinsip pengelolaan BUMDes. Prinsip pengelolaan BUMDes sangat penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar bisa dipahami serta dipersepsikan dengan cara serupa oleh pemerintah desa, anggota atau penyerta modal, BPD, pemerintah kabupaten, serta masyarakat.

Kemendesa dalam naskah penjelasan Undang-Undang Desa menguraikan bahwa kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau koperasi karena dasar pembentukan BUMDes adalah peraturan, bukan akta. BUMDes memiliki tujuan khusus yakni kepemilikan secara utuh dan total atas bisnis oleh pemerintah desa untuk tujuan kepentingan rakyat, dalam hal ini masyarakat desa. BUMDes adalah institusi desa yang bersifat kolektif, berskala lokal desa dan kawasan pedesaan, yang pendiriannya dibahas dalam Musdes dan ditetapkan melalui Perdes (Suryanto, 2018: 18).

Menurut Rudi Suryanto (2018: 5) misi pengembangan BUMDes adalah menggerakkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi. Di dalam Permendes No. 2/2015 tentang BUMDes dijelaskan bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi.

BUMDes harus dimulai dengan semangat kedaulatan dan kemandirian ekonomi desa. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Cibalong yaitu salah satu desa di Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai luas wilayah 330.050 Ha. Desa Cibalong adalah sebuah desa yang terletak di perbukitan dan di bawahnya dilewati oleh sungai Ciwulan dengan ketinggian di atas permukaan laut \pm 350 mdpl dengan koordinat 7°30'54,23" Lintang Selatan (LS) dan 108°10'57,39" Bujur Timur (BT). Tingkat curah hujan pertahun rata-rata 2.072 mm dan suhu rata-rata harian 20°C sampai 34°C (Data profil Desa Cibalong: 2018).

Mata pencahariannya masyarakat Desa Cibalong sangat beragam, namun sebagian besar adalah petani dan buruh tani, sebagian lagi tak tentu pekerjaannya. Hal ini disebabkan oleh proses pembangunan yang tidak merata, adanya gap antara kota dan desa. Karena masih kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Desa Cibalong, maka angka pengangguran cukup tinggi (Wawancara dengan Wati Suharti selaku sekretaris Desa Cibalong).

Hasil penelitian ini menemukan tentang perencanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah, mengetahui produk-produk pemberdayaan yang diharapkan masyarakat, dan output dari pemberdayaan BUMDes Amanah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Cibalong Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Perencanaan dari Profram Pemberdayaan BUMDes Amanah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dilihat dari survei penghasilan masyarakat Desa Cibalong rata-rata kurang dari Rp500.000/bulan (Data profil Desa Cibalong: 2018). Upaya mendorong masyarakat agar terlepas dari penghasilan rendah atau kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab kondisi kemiskinan itu sendiri berdampak pada perilaku dan semangat dalam menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya menyadarkan masyarakat miskin dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka juga dapat menikmati kehidupan yang layak. Sebagaimana menurut Nazaruddin Margolang dkk (2014: 1) pemberdayaan masyarakat agar memiliki daya dan terlepas dari kemiskinan harus dilakukan secara sistematis dan terencana, mulai dari tahapan pemungkinan agar mereka dapat berkembang, kemudian penguatan agar mereka menjadi kompeten dan unggul, kemudian perlindungan agar mereka tidak tereksplotasi serta makin termajinalkan, kemudian penyokongan dan pemeliharaan.

Lembaga ekonomi desa menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi desa dan mampu mengelola aset ekonomi strategis sekaligus mengembangkannya sehingga pada gilirannya akan meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Menurut Kadek Darwita (2018: 56) pemerintah Desa juga dapat menjadi komunikator dalam mencari terobosan dalam pembangunan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. Desa Cibalong mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran masyarakat, meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cibalong (Wawancara dengan Tatang Gunawan selaku Direktur BUMDes Amanah).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cibalong diberi nama BUMDes Amanah karena sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Cibalong. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah berdiri pada Tanggal 15 Mei 2017 dengan Peraturan Desa atau Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2017 (surat keputusan kepala desa) di Desa Cibalong untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BUMDes Amanah berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga BUMDes bersifat menyediakan kebutuhan masyarakat dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan (AD/ART BUMDes Amanah: 2018).

Pembentukan BUMDes perlu diawali dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Sebagai unit bisnis dengan social benefit, menurut Rudy Suryanto (2018: 82) yang membedakan model pembentukan BUMDes dengan unit bisnis lainnya adalah pertimbangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa. Langkah dasar dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut: sosialisasi pembentukan BUMDes, pembentukan tim persiapan pendirian BUMDes, pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha, penyusunan Raperdes dan AD/ART BUMDes, persiapan pelaksanaan Musdes, pelaksanaan Musdes, penerbitan Perdes, dan rekrutmen serta pelantikan pengelola BUMDes.

Dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memerlukan langkah sistematis untuk mewujudkan tujuan BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara (Wawancara dengan Tatang Gunawan sebagai Direktur BUMDes Amanah), langkah-langkah dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Desa Cibalong adalah sebagai berikut: Pertama, mengadakan musyawarah pemerintahan desa, yang terdiri dari kepala Desa, BPD, dan wakil-wakil dari masyarakat perdusun di Desa Cibalong yang terdiri dari tiga dusun

untuk memecahkan masalah di bidang perekonomian. Kedua, Menggali potensi yang ada di Desa Cibalong. Ketiga, Setelah mendapatkan potensi yang ada di Desa Cibalong, maka pemerintahan desa merencanakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa. Keempat, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah didirikan pada tanggal 17 Mei 2017 atas dasar musyawarah desa. Kelima, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah ditetapkan dengan peraturan Desa Cibalong No. 06 Tahun 2017 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan keputusan kepala desa yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keenam, Setelah ditetapkan kebijakan mengenai peraturan desa tentang BUMDes tersebut, maka dipertanggungjawabkan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibalong, pemerintahan Desa Cibalong akan mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakat dan bagaimana cara memberdayakan ekonomi tersebut. BUMDes ini sangat bermanfaat untuk masyarakat desa. Seperti yang dikatakan oleh oleh Tatang Gunawan:

“BUMDes ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, baik untuk kalangan miskin, menengah maupun masyarakat lainnya karena pendirian BUMDes tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat desa”. (Sumber dari hasil wawancara dengan Tatang Gunawan sebagai Direktur BUMDes Amanah, pada tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.20 di Kantor BUMDes Amanah).

Berdasarkan hasil kuitipan wawancara sebelumnya bersama bapak Tatang Gunawan, dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wadah untuk menjalankan usaha di desa. Program yang diterapkan di setiap desa berbeda-beda, tergantung apa yang dimiliki oleh desa tersebut untuk dikembangkan dan menjadi penghasilan tambahan untuk mensejahterakan masyarakat. Usaha desa adalah segala jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi di desa. Berdasarkan hasil musyawarah perangkat desa dan juga masyarakat Desa Cibalong dengan melihat potensi masyarakat dan kebutuhan masyarakat, maka jenis usaha yang ditetapkan dan disahkan pada Peraturan Desa Cibalong Nomor 06 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: pelayanan simpan pinjam, tagihan listrik, warung bumdes, pelayanan jasa sewa konstruksi bangunan/molen, industri kecil dan kerajinan rakyat, pelatihan dan pembinaan wirausaha, melayani penjualan dan pembelian hasil bumi masyarakat desa, pelayanan photocopy, cetak photo, penjilidan, dan pengadaan ATK. Pengembangan usaha BUMDes Amanah dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Produk-Produk Pemberdayaan Ekonomi yang diharapkan oleh Masyarakat pada BUMDes Amanah

Masyarakat Desa Cibalong memiliki mata pencaharian yang beragam, namun kebanyakan bertani dan buruh. Masalah yang paling menonjol adalah masyarakat yang kurang mampu atau disebut kemiskinan. Karena di Desa Cibalong masih ada rumah-rumah yang kecil, yaitu kurang dari 8 meter, lantainya masih beralas tanah, pendidikan kepala rumah tangga rendah, dan penghasilannya kurang dari Rp500.000,- (Wawancara dengan Iwan Setiawan selaku Bendahara BUMDes Amanah). Dalam hal ini, masyarakat masih banyak yang mengeluh dalam permodalan, maka dari itu sangatlah layak untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena sebagai penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibalong ini.

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah, segala harapan masyarakat bisa terwujud dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Cibalong. Pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial (Entang, 2018: 30). Sosialisasi mengenai BUMDes diadakan oleh pengurus BUMDes dengan mengundang Ketua Dusun, Ketua RW dan Ketua RT untuk nanti disampaikan kepada masyarakat. Namun, masyarakat Desa Cibalong hanya sebagian yang mengetahui mengenai adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah, hal ini disebabkan tidak semua aparat pemerintah setempat mensosialisasikan keberadaan BUMDes karena terhalang oleh jarak dari rumah ke rumah yang sepanjang jalannya pesawahan, dan perkebunan.

Sebagian masyarakat Desa Cibalong yang saya wawancarai memiliki harapan-harapan terhadap adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah, diantaranya sebagai berikut: Pertama, mendapatkan lapangan pekerjaan. Pekerjaan merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, karena dengan pekerjaan itu bisa menghasilkan uang, dan dengan uang akan terpenuhi kebutuhannya. Banyak masyarakat Desa Cibalong yang belum bekerja, hal ini disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan, dan kepala keluarga sudah tidak mampu bekerja berat lagi (Wawancara dengan Aef Saprudin selaku tokoh masyarakat). Maka dari itu masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Masyarakat sangat berharap dengan adanya BUMDes ini mereka tidak menganggur lagi dan mendapatkan gaji yang layak.

Kedua, meningkatkan penghasilan masyarakat Desa Cibalong. Penghasilan masyarakat desa kebanyakan kurang dari Rp500.000/bulan (Data profil Desa Cibalong: 2018), sebagian yang bekerja menjadi guru swasta hanya mendapatkan gaji Rp250.000/bulan, apalagi buruh tani yang hanya diberikan seenaknya saja. Maka masyarakat desa Cibalong berharap terjadi peningkatan penghasilan untuk

mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka (Wawancara dengan Aef Saprudin selaku tokoh masyarakat).

Ketiga, memberikan modal usaha. Masyarakat Desa Cibalong memiliki potensi dalam membuat makanan-makanan seperti membuat kue, cilok, cimol, seblak, gorengan dan cemilan-cemilan, misalnya keripik-keripik pedas. Namun yang menjadi kendala masyarakat tidak mempunyai modal untuk membuka usaha. Maka dari itu membutuhkan modal usaha untuk memulai berwirausaha, sehingga dengan penghasilan usaha tersebut dapat memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sebagaimana ibu rumah tangga yang ingin membuka usaha kue, namun tidak mempunyai modal untuk memulai usahanya. Membuat kue apabila ada yang memesan langsung ke rumahnya (Wawancara dengan Roro selaku ibu rumah tangga).

Keempat, pelatihan dan pembinaan menjadi wirausaha. Di Desa Cibalong banyak anak muda dan ibu-ibu yang menganggur, mereka menginginkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun mereka tidak mempunyai motivasi, dan bermental pesimis karena merasa diri tidak memiliki kemampuan apapun. Maka dari itu mereka membutuhkan motivasi mengenai semangat kerja, serta membutuhkan pelatihan dan pembinaan mengenai wirausaha. Menjadi wirausaha adalah hal yang membanggakan, karena bukan hanya untuk diri sendiri tetapi menciptakan pula lapangan pekerjaan yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Mental wirausaha sangat diperlukan untuk masyarakat, contohnya mengadakan seminar dan pameran kewirausahaan agar masyarakat tertari dan berminat untuk berwirausaha (Wawancara dengan Imam Maulana selaku tokoh pemuda).

Kelima, membuat kerajinan khas masyarakat Desa Cibalong. Banyak potensi alam di Desa Cibalong, contohnya banyak pohon bambu dan pohon kelapa. Namun masyarakat tidak tahu mengenai manfaat pohon tersebut. Kabupaten Tasikmalaya, terutama pada era sebelum 1980-an, dikenal sebagai basis perekonomian rakyat dan usaha kecil menengah seperti kerajinan dari bambu, batik, dan payung kertas. Pohon bambu dan pohon kelapa bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan. Misalnya untuk peralatan memasak, peralatan makan, peralatan bangunan, bahkan dijadikan senjata. Salah satu pemanfaatan penggunaan bambu yang masih digunakan hingga kini adalah kerajinan anyaman, namun hanya sedikit yang bisa membuatnya (Wawancara dengan Roro selaku ibu rumah tangga). Dengan adanya BUMDes Amanah ini, masyarakat berharap bisa memanfaatkan pohon tersebut dan menjadi sebuah karya yang bisa dijual untuk menambahkan penghasilan.

Keenam, penyediaan sembako murah. Keluhan masyarakat kebanyakan dalam masalah pada bahan pokok, karena harga bahan pokok selalu naik secara

bertahap, seperti halnya yaitu harga beras, gas, galon dan bahan pokok lainnya. Harga bahan pokok mahal itu disebabkan karena jarak antara kampung dengan pasar itu sangat jauh sehingga harga bahan pokok itu mahal. Banyaknya warga yang mengeluh, itu menjadikan keresahan di masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Permasalahan besarnya adalah jarak tempuh ke pasar ditambah jalannya yang rusak sehingga ketika belanja harus di tambah dengan ongkos perjalanan (Wawancara dengan Imam Maulana selaku tokoh pemuda).

Ketujuh, penyediaan fasilitas dalam kegiatan sehari-hari. Keluhan tidak adanya fasilitas yang memadai menjadi masalah seperti masyarakat memproduksi makanan untuk bisa dijual keluar dari Desa Cibalong sangatlah sulit karena akses jalan yang kurang mendukung. Sebagaimana menurut Risniwati (2018:167) sulitnya akses transportasi dan jalan yang rusak, itu menjadi kendala masyarakat dalam mengembangkan industri rumahan (home industry). Minimnya sarana transportasi menjadikan masyarakat kurang tertarik dalam membuka usaha atau berdagang, perhatian pemerintah sangat diharapkan demi membantu proses pembangunan desa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Wawancara dengan Aef Saprudin selaku tokoh masyarakat). Karena sebelum periode sekarang anggaran desa belum cukup untuk dialokasikan secara merata terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan merupakan solusi dalam memecahkan permasalahan sosial, di antaranya pemberdayaan jalan dan lingkungan, pemberdayaan irigasi, dan yang lainnya.

Kedelapan, pendirian Desa Wisata, Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata dalam artian sederhana merupakan suatu objek wisata yang memiliki potensi seni dan budaya unggulan di suatu wilayah atau pedesaan yang berada di pemerintah daerah. Suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa keunikan fisik lingkungan alam pedesaan, maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik sehingga daya tarik perdesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut. Desa Cibalong mempunyai sumber air yang cukup melimpah, serta terdapat sumber air panas (Cipanas) yang berasal dari gunung aktif. Namun air panas tersebut tidak ada yang mengelolanya. Dengan demikian masyarakat berharap Cipanas tersebut dikelola oleh BUMDes menjadi desa wisata pemandian air panas dengan di desain semenarik mungkin agar banyak peminatnya. Jalan Raya Desa Cibalong sering dilalui oleh banyak wisatawan yang menuju ke Pantai Cipatujuh dan Pamijahan. Jadi tempat yang strategis apabila Desa Cibalong menjadi Desa Wisata (Wawancara dengan Waslihah selaku tokoh wanita).

Kesembilan, penyediaan pembelian penjualan hasil pertanian dan

perkebunan. Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor andalan bagi perkembangan perekonomian Desa Cibalong. Banyak petani di pelosok desa yang menjual hasil pertanian dan perkebunannya ke bandar-bandar dengan harga murah. Hal ini disebabkan petani tidak mempunyai kendaraan untuk menjualnya langsung ke pasar, maka dari itu petani pasrah untuk menjual hasil pertanian dan perkebunannya ke bandar dengan harga murah. Para petani berharap dengan adanya BUMDes ini bisa membeli dan menjual dengan harga yang layak seperti di pasaran (Wawancara dengan Mumu selaku tokoh petani).

Kesepuluh, memudahkan untuk mengambil dan mentransfer uang. Kebanyakan masyarakat Desa Cibalong bekerja di perkotaan dan banyak juga yang menjadi pelajar di kota. Orang tua banyak yang mengeluh tidak dapat mengambil uang dari anaknya dan mentransfer uang kepada anaknya dengan jarak yang dekat. Apabila ke bank membutuhkan waktu dan jarak tempuh yang jauh, serta membutuhkan transportasi seperti ojeg atau elep yang biaya ongkosnya mahal. Maka masyarakat berharap dengan adanya BUMDes Amanah ini ada BRI link untuk memudahkan segala bentuk transaksi (Wawancara dengan Wasliah selaku tokoh wanita).

Hasil Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Desa Cibalong, hal ini dilihat dari beberapa hasil yang didapatkan sebagai peningkatan ekonomi masyarakat Desa Cibalong dan penyediaan kebutuhan Desa Cibalong diantaranya pelayanan simpan pinjam. Simpan pinjam adalah salah satu jenis usaha yang justru paling mampu menciptakan multi efek bagi ekonomi desa. Sebagai lembaga yang mampu mendukung sistem permodalan para pelaku ekonomi desa, perbankan desa bisa mendukung segala jenis usaha masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rudy Suryanto (2018: 44) bahwa simpan pinjam ialah usaha jasa untuk membantu pemberdayaan ekonomi. Di desa manapun, di wilayah manapun, permodalan adalah salahsatu mesin penggerak perekonomian (Wawancara dengan Ani Amarwati selaku pengurus bidang usaha simpan pinjam).

Di Desa Cibalong sendiri dengan adanya simpan pinjam akan mengurangi peran tengkulak yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Tasikmalaya dikenal sebagai kota kredit akibat banyaknya pedagang dan perantau dari wilayah ini yang berprofesi sebagai pedagang yang menggunakan sistem kredit. Simpan Pinjam di BUMDes Amanah membantu masyarakat mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dan bunga yang semurah mungkin. Berbeda dengan bank komersil di negeri ini, sudah bukan rahasia lagi kurangnya keberpihakan pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi pemodalannya, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkaman

lenterir yang selama ini berkeliaran di desa-desa. Di BUMDes Amanah sendiri bunganya hanya sedikit yaitu hanya 2% yang dibagi untuk pemasukan ke desa, menambahkan modal, operasional pengurs, dan untuk ATK.

Selanjutnya warung BUMDes, yang menyediakan kebutuhan masyarakat untuk memudahkan masyarakat membelinya dengan harga terjangkau, meliputi penjualan: gas LPG, air gallon, ATK, pulsa, dan Foto Copy. Selain itu, BUMDes Amanah menyediakan BRI link. Dengan melayani berbagai transaksi seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, cicilan multifinance, setoran tunai, penarikan tunai, transfer antar Bank BRI maupun antar Bank lain, hal ini memudahkan orang tua yang akan mentransfer uang untuk anaknya yang sekolah di kota dan memudahkan juga untuk mengambil uang tanpa perlu jauh-jauh dan antri di Bank.

Selanjutnya, BUMDes Amanah melayani penjualan dan pembelian hasil bumi. Salah satu potensi masyarakat Desa Cibalong adalah pertanian dan perkebunan. Masyarakat banyak yang berkebun buah salak pondoh dan buah pepaya california, luas tanahnya sampai berhektar-hektar (Wawancara dengan Tatang Gunawan selaku Direktur BUMDes). Maka dari itu, buah salak pondoh dan buah pepaya california menjadi penjualan dan pembelian hasil bumi di BUMDes Amanah.

Tabel 1.

Omset Penjualan Hasil Bumi Tahun 2018

NO	NAMA PRODUK	KAPASITAS PRODUKSI	OMSET PENJUALAN	KENDALA & HAMBATAN PENGEMBANGAN
1	Pepaya Calipornia	400 Kg / bulan	2000 X 400 kg	Kekurangan Bahan Baku Pemasaran dan pembibitan, permodalan pengembangan usaha
2	Salak Pondoh	200 Kg /bualn	5000 X 200 kg	Cara peningkatan produksi

Sumber: Data Omset BUMDes Amanah Tahun 2018

Berdasarkan pemaparan pada Tabel 1, sangat besar sekali manfaat adanya program pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masyarakat desa mendapatkan kemajuan yang baik terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan perwujudan kesejahteraan. Dengan demikian masyarakat harus terus menjaga dan mengembangkan terhadap program yang sudah dijalankan,

terutama perhatian dari pemerintah masyarakat untuk terus mensupport dan mengevaluasi bagaimana kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat agar terus berkembang, berikut adalah tabel matriks dari hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tabel 2.
Neraca Rugi Laba Bulan Januari Tahun 2019

JANUARI	
PENDAPATAN USAHA	
Pendapatan simpan pinjam	1.612.000
Gas	75.000
Galon	21.000
ATK	16.000
Pulsa	45.800
Photocoopy	8.900
BRI Link	852.532
JUMLAH	2.631.232
PENGELUARAN USAHA	
Pendapatan asli Desa	263.000
Pengembalian modal	263.000
Komisaris	172.000
Beban gaji	1.933.232
JUMLAH	2.631.232

Sumber: Data Laporan BUMDes Amanah Tahun 2019

Kondisi masyarakat Desa Cibalong sesudah pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut: *Pertama*, keringanan harga bahan pokok. Setelah adanya program BUMDes Amanah masyarakat mendapatkan keringanan harga bahan pokok dan di dorong dengan akses jalan yang baik sehingga jangkauan menjadi mudah, tidak terukur oleh jauh dekatnya. BUMDes Amanah menyediakan kebutuhan bahan pokok yang masyarakat butuhkan, seperti tabung gas, galon, beras dan sebagainya. Dengan adanya BUMDes harganya tidak terlalu mahal, contohnya harga gas yang sebelum adanya program BUMDes mencapai Rp30.000,- per tabung gas, sekarang harganya relatif murah dengan harga Rp25.000,- per tabung gas (Wawancara

dengan Roro selaku ibu rumah tangga).

Kedua, pemberian modal usaha Dengan adanya kegiatan simpan pinjam sebagai jenis usaha yang paling mampu menciptakan multi efek bagi ekonomi masyarakat. Hasil pinjaman itu dijadikan modal usaha bagi masyarakat yang ingin berwirausaha. Sebagaimana menurut Ai Elis Erna (2018: 83) Badan Usaha Milik Desa memiliki program untuk mengelola kekayaan yang ada di Desa, yaitu dengan diberikannya bantuan modal kepada orang yang mau memulai usaha. Masyarakat mempunyai semangat dan menyadari untuk memulai usaha dengan diberi bantuan dalam peminjaman. Seperti Ibu Tini yang memulai usaha menjual cilok dengan modal dari pinjaman BUMDes dan juga Ibu Mila meneruskan usaha sate yang sempat gulung tikar karena suaminya meninggal. Dengan adanya pemberian modal usaha, maka penghasilan masyarakat desa meningkat rata-rata 40% s.d. 50%, yaitu dari Rp500.000/bulan menjadi Rp1.000.000/bulan.. Masyarakat yang memulai usaha, akan memberikan lapangan pekerjaan kepada tetangga-tetangganya untuk membantu dalam proses usaha tersebut (Wawancara dengan Tini, selaku pengusaha).

Ketiga, mendapatkan pelatihan wirausaha. Berjalannya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu melalui pelatihan-pelatihan wirausaha yang dilakukan oleh masyarakat setiap 3 bulan sekali. Tujuan pelatihan ini adalah memberikan motivasi, menumbuhkan mental wirausahawan serta rasa percaya diri dan menyadari kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan. Dengan pelatihan ini BUMDes Amanah memberikan peluang pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginan sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Sebagaimana menurut Risniwati (2018) pelatihan wirausaha harus memudahkan masyarakat dalam melakukan atau mencari usaha apa yang akan direncanakan. Di pelatihan wirausaha BUMDes Amanah diutamakan untuk kaum perempuan yaitu ibu-ibu rumah tangga banyak yang tidak bekerja dan berkeinginan untuk mempunyai usaha . Maka dengan adanya pelatihan ini ibu-ibu bisa berwirausaha di rumah untuk membantu suaminya (Wawancara dengan Tini selaku pengusaha). Pelatihan yang sudah dilakukan adalah pembuatan kecimpring.

Keempat, mendapatkan layanan pemerintah. Pelayanan BUMDes Amanah ini sangat baik, semua pegawai atau pengurusannya melayani dengan sepenuh hati sehingga menyenangkan masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, beberapa narasumber menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Peran yang begitu besar adalah dorongan dari pemerintah desa yang telah menjalankan dan merealisasikan program pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa dan juga pemerintah pusat yang memberikan anggaran

dana desa yang cukup besar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah ini berhasil membuat kagum warga masyarakat terutama yang berlokasi di wilayah kantor desa, karena sejak keberadaannya, memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan berbelanja keperluan sehari-hari. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh pihak-pihak yang terkait atau yang mengerti tentang Badan Usaha Milik Desa tersebut sehingga bisa menjalankan program dalam mengembangkan usaha masyarakat desa, kemudian pemerintah sangat memberikan dorongan kepada Badan Usaha Milik Desa untuk menjalankan perannya yang telah ditetapkan sejak awal. Karena mereka sudah pasti mengetahui apa dan bagaimana Badan Usaha Milik Desa ini harus berjalan.

Dorongan dan semangat dari pengurus yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan lembaga usaha untuk kepentingan lembaga atau kepentingan masyarakat juga. Ketika pengurus menjalankan tugas dan kewajibannya seperti membuat Rancangan Anggaran Tahunan, menjalankan aturan-aturan, maka apa yang telah dirapatkan atau menjadi visi misi sebuah lembaga akan tercapai dan lembaga tersebut akan berkembang. Indikator keberhasilan pemberdayaan menurut Edi Suharto (2017:63) ialah menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Masyarakat Desa Cibalong termasuk berdaya, karena adanya partisipasi dan dukungan masyarakat sekitar. Sasaran pemberdayaan terhadap pelaksanaan kegiatan program BUMDes Amanah berjalan dengan masyarakat mengikuti kegiatan yang diadakan BUMDes dengan tujuan mensejahterakan kehidupan ke arah yang lebih baik.

PENUTUP

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga pemberdayaan ekonomi yang mewakili pemerintah desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan penyediaan layanan umum bagi masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Cibalong, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perencanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah menjadi prioritas utama dalam memulai pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Cibalong, maka Tim Persiapan Pendirian (TPP) BUMDes melibatkan berbagai unsur masyarakat desa yaitu perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Daerah), dan tokoh-tokoh masyarakat. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perencanaan BUMDes Amanah tersebut dimulai dari pembentukan tim kajian usaha, kajian potensi desa, kajian kebutuhan masyarakat, dan kajian penentuan pilihan jenis usaha.

Kedua, produk-produk pemberdayaan dari usulan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan keinginan masyarakat, maka Tim Persiapan Pendirian (TPP) BUMDes membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberi masukan dan saran potensi apa yang perlu diolah lebih lanjut menjadi usaha BUMDes. Masyarakat berpartisipasi memberikan usulan produk pemberdayaan dan siap untuk mengikuti program dari BUMDes Amanah.

Ketiga, hasil atau output dari pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Cibalong adalah terwujudnya masyarakat yang berdaya, mandiri, dan sejahtera. Sebagian harapan-harapan masyarakat telah terwujud, diantaranya keringanan harga bahan pokok yang masyarakat butuhkan, mendapatkan modal usaha dengan bunga murah, mendapatkan pelatihan wirausaha, dan mendapatkan pelayanan baik. Dengan adanya pemberian modal usaha, maka penghasilan masyarakat desa meningkat rata-rata 40% s.d. 50%, yaitu dari Rp500.000/bulan menjadi Rp1.000.000/bulan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah mempunyai peran meningkatkan ekonomi masyarakat, hal ini disebabkan adanya dorongan dari pemerintah yang telah menjalankan dan merealisasikan program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, penulis menyampaikan saran sebagai berikut: *Pertama*, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan melengkapi mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga ekonomi khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program yang diberi perhatian lebih dan dijadikan unggulan pemerintah dalam upaya menjadikan desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Untuk selanjutnya BUMDes harus mampu melaksanakan semangat kedaulatan dan kemandirian ekonomi desa. *Kedua*, dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan tujuan apakah BUMDes tersebut berperan atau tidak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Untuk memperluas pengalaman dan keilmuan, peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengkaji mengenai tata kelola BUMDes, peningkatan akses pasar, dan cara membangun jejaring BUMDes secara Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia.
- Aliyudin. (2016). Dakwah Bi Al-Hal melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, 15(2), 187-206.

- Aripudin, A. (2008). Dakwah dan Hukum Lingkungan Hidup dalam *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(11), 123-149.
- Atmojo, S.T. (2015). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi, Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jember.
- Basith, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Darwita, K dan Redana, D.N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dalam *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 51-60.
- Enjang, A.S. (2008). Dakwah Smart: Proses Dakwah sesuai dengan Aspek Psikologis Mad'u dalam *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(12), 259-289.
- Entang, A.S. (2018). Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), 25-46.
- Hardjasoemantoro, K. (1995). *Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irma, A. N. (2018). *Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Bersama Tri Mitra Abadi di Desa Karyajaya Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP). UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Irma, A.N. (2018). *Peran Badan Usaha Milik DEsa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Kuswana, D. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Machendrawaty, N & Safei, A.A. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Strategi sampai Tradisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Margolang, N, Zulkarnain & Munir, T.K.A. (2014). *Strategi dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Riau: UR Press.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyadi. (2012). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Risniwati. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMD)*. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Rustiadi & Pranoto. (2007). *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan*. Bogor: Crestpent Press.
- Setiawan, A.I. (2012). *Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan*

- Kesejahteraan Mad'u. *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 6(2), 347-362.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembnagunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT refika Aditama.
- Sumodiningrat, G, & Wulandari, A. (2016). *Membangun Inonesia dari Desa*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sumpena, D. (2012). Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan Budaya Sunda. *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 6(1), 101-120.
- Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan BUMDes Sukses*. Yogyakarta: PT. Syncore Indonesia.
- Wijaya, D. (2018). *BUMDESA Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yustia, T.V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia.

